



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl.Raya Negara KM 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp.(0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 420/IQ64/2/DPK-LK/II/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PKBM. JAZIRAH"

- Menimbang : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional "PKBM. JAZIRAH" yang berlokasi di Jorong Koto Tangah Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
b. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/ Operasional PKBM. JAZIRAH di Jorong Koto Tangah Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;
- Memperhatikan : Permohonan dari Pengurus Yayasan PKBM. JAZIRAH

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Kepada ALWI SAPUTRA, S.E untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan Nama PKBM. JAZIRAH di Jorong Koto Tangah Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun. Setiap lembaga yang dikeluarkan Izin Operasional, harus memperpanjang izin tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Membuat Permohonan
2. Melampirkan Foto Copy Izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- Ketiga : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan Setiap Bulan Kepada Pengawas Lembaga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Kecamatan Kapur IX.
- Keempat : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal di tetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak
Pada Tanggal : 16 Juli 2024

